

“

“Memahami keterkaitan kekuasaan, pasar, dan masyarakat adalah kunci menavigasi masa depan yang tidak pasti.”



EKONOMI DAN POLITIK KONTEMPORER

DINAMIKA KEKUASAAN, PASAR, DAN MASYARAKAT

OLEH

RUDY C TARUMINGKENG



PERSPEKTIF GLOBAL
Menganalisis tren dan tantangan dunia kontemporer



ANALISIS MENDALAM
Mengurai hubungan ekonomi, politik, dan kekuasaan



BERORIENTASI PADA MANUSIA
Mencari keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

8 April 2026

EKONOMI DAN POLITIK KONTEMPORER: DINAMIKA KEKUASAAN, PASAR, DAN MASYARAKAT

Abstrak

Makalah ini membahas hubungan yang semakin erat antara ekonomi dan politik dalam dunia kontemporer. Tesis utama tulisan ini adalah bahwa pasar tidak pernah bekerja dalam ruang hampa; ia selalu dibentuk oleh negara, institusi global, perusahaan besar, teknologi, dan tekanan masyarakat. Dalam lanskap mutakhir, perlambatan pertumbuhan global, ketidakpastian kebijakan dagang, konsentrasi kekuatan digital, tekanan pada demokrasi, dan transformasi teknologi berbasis AI telah mengubah cara kekuasaan dijalankan dan bagaimana kesejahteraan didistribusikan. IMF memproyeksikan pertumbuhan global melambat dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026, sementara WTO memperingatkan bahwa volume perdagangan barang dunia dapat berkontraksi 0,2 persen pada 2025 akibat tarif tinggi dan ketidakpastian kebijakan. Pada saat yang sama, V-Dem mencatat bahwa hampir tiga perempat populasi dunia kini hidup dalam rezim autokratis, sedangkan UNDP menunjukkan kemajuan pembangunan manusia global melambat tajam dan jurang antarnegara kembali melebar. Dalam konteks ini, makalah

menegaskan perlunya sintesis baru antara efisiensi pasar, legitimasi politik, dan keadilan sosial agar pembangunan tidak hanya tumbuh secara statistik, tetapi juga kokoh secara institusional dan manusiawi. ([IMF](#))

Kata kunci: *ekonomi politik, kekuasaan, pasar, demokrasi, AI, ketimpangan, pembangunan*

Ekonomi dan Politik Kontemporer: Dinamika Kekuasaan, Pasar, dan Masyarakat

1. Pendahuluan

Ekonomi dan politik kontemporer tidak dapat dipahami sebagai dua wilayah yang berdiri sendiri. Dalam praktiknya, harga energi, arah investasi, regulasi data, tarif perdagangan, subsidi industri, bahkan algoritma yang menentukan arus informasi publik, semuanya merupakan hasil interaksi antara logika pasar dan logika kekuasaan. Karena itu, ketika kita membicarakan ekonomi, sesungguhnya kita juga sedang membicarakan siapa yang berhak menetapkan aturan; dan ketika kita membicarakan politik, kita juga sedang membicarakan bagaimana sumber daya dialokasikan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung biaya perubahan.

Dalam beberapa dekade sebelumnya, banyak wacana pembangunan diasumsikan bergerak menuju integrasi global yang semakin dalam, liberalisasi perdagangan yang semakin luas, dan penguatan demokrasi yang relatif linear. Namun perkembangan mutakhir menunjukkan arah yang jauh lebih kompleks. IMF mencatat bahwa 2025 diwarnai oleh perubahan prioritas kebijakan, dominasi isu perdagangan, dan ketidakpastian yang tinggi, sementara WTO menyatakan tarif yang sangat

tinggi serta ketidakpastian kebijakan dagang telah menjadi faktor utama yang menekan perdagangan dunia. Dengan kata lain, kita hidup di zaman ketika ekonomi global tetap saling terhubung, tetapi konektivitas itu kini berlangsung di bawah bayang-bayang fragmentasi, rivalitas strategis, dan kalkulasi keamanan nasional. ([IMF](#))

Makalah ini berangkat dari pandangan ekonomi-politik bahwa pasar adalah konstruksi institusional. Ia tidak muncul secara alamiah sebagai mekanisme netral, melainkan dibentuk oleh hukum, infrastruktur, kapasitas negara, dan posisi tawar aktor-aktor besar. Karena itu, pertanyaan sentral makalah ini bukan sekadar "bagaimana ekonomi tumbuh," melainkan "siapa yang mengarahkan pertumbuhan itu, dengan instrumen apa, dan untuk kepentingan siapa." Di sinilah hubungan antara kekuasaan, pasar, dan masyarakat menjadi inti pembahasan.

Secara lebih spesifik, makalah ini akan menunjukkan tiga hal. Pertama, kekuasaan kontemporer semakin bergeser dari bentuk koersif klasik menuju bentuk yang lebih tersebar, yakni melalui regulasi, rantai pasok, arsitektur digital, dan penguasaan data. Kedua, pasar global semakin dipengaruhi pertimbangan geopolitik dan geoeconomics, sehingga efisiensi tidak lagi menjadi satu-satunya prinsip pengambilan keputusan. Ketiga, masyarakat berada dalam posisi ambivalen: di satu sisi menikmati inovasi, konektivitas, dan kesempatan baru; di sisi lain menghadapi kerentanan pekerjaan, konsentrasi kekayaan, erosi kepercayaan publik, dan tekanan terhadap demokrasi. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

2. Kerangka Konseptual: Ekonomi-Politik sebagai Pembacaan atas Relasi Kuasa

Pendekatan ekonomi-politik melihat bahwa kegiatan ekonomi selalu tertanam dalam struktur sosial dan politik. Harga, upah, pajak, subsidi,

perlindungan sosial, dan regulasi persaingan bukan hanya variabel teknis, tetapi juga ekspresi dari kompromi sosial yang lahir dari pertarungan kepentingan. Karena itu, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur oleh pertumbuhan PDB semata. Pertanyaan yang sama pentingnya ialah apakah pertumbuhan itu inklusif, apakah ia memperluas kapasitas manusia, dan apakah ia menopang legitimasi institusi politik.

Di dunia kontemporer, pendekatan ini menjadi semakin relevan karena masalah-masalah utama ekonomi kini justru bersumber dari persilangan domain. Krisis biaya hidup tidak hanya berkaitan dengan inflasi, tetapi juga dengan perang, tarif, logistik, dan kapasitas fiskal. Disrupsi digital tidak hanya menyangkut produktivitas, tetapi juga konsentrasi pasar, privasi data, dan tata kelola platform. Bahkan isu pembangunan manusia tidak lagi cukup dibahas lewat pendidikan dan kesehatan semata, sebab UNDP menegaskan bahwa pilihan kebijakan terkait AI, pekerjaan, dan institusi akan menentukan apakah teknologi menjadi mesin kemajuan bersama atau sumber ketimpangan baru.

Dengan demikian, ekonomi-politik kontemporer dapat dipahami sebagai studi tentang bagaimana negara, korporasi, lembaga internasional, dan masyarakat sipil berinteraksi dalam menentukan aturan permainan ekonomi. Negara tidak lenyap di era globalisasi; ia justru kembali tampil sebagai aktor strategis. Hanya saja, peran negara kini lebih rumit. Ia harus menarik investasi, melindungi warga, mengelola utang, menjaga daya saing, menavigasi teknologi, dan sekaligus mempertahankan legitimasi demokratis. Bila negara terlalu lemah, pasar dikuasai oligopoli dan kepentingan eksternal. Bila negara terlalu dominan namun tidak akuntabel, ekonomi berubah menjadi alat patronase dan pembatasan kebebasan.

3. Dinamika Kekuasaan: Dari Negara Teritorial ke Negara Strategis

Salah satu perubahan paling mencolok dalam ekonomi-politik kontemporer adalah kembalinya negara sebagai aktor ekonomi strategis. Pada fase liberalisasi terdahulu, negara sering didorong untuk mundur dari

pasar dan fokus pada deregulasi. Kini, justru banyak negara aktif menggunakan tarif, subsidi industri, kontrol ekspor, kebijakan chip, energi, pangan, dan investasi infrastruktur sebagai instrumen kekuasaan. WTO menunjukkan bahwa gelombang tarif baru mendorong penurunan tajam prospek perdagangan barang dunia; sementara UNCTAD memperingatkan bahwa fragmentasi geoekonomi yang berkelanjutan dapat memperdalam perlambatan global.

Perubahan ini menandai pergeseran dari globalisasi berbasis efisiensi menuju globalisasi berbasis ketahanan. Dulu, perusahaan cenderung menempatkan produksi di lokasi termurah dan paling efisien. Kini, keamanan pasokan, stabilitas politik, kedekatan geopolitik, dan kemampuan menghadapi sanksi atau tarif menjadi sama pentingnya. Rantai pasok tidak lagi sekadar jaringan produksi; ia telah menjadi infrastruktur kekuasaan. Ketika akses terhadap semikonduktor, mineral kritis, energi, atau data dikuasai oleh segelintir negara atau perusahaan, maka kekuatan ekonomi berubah menjadi daya tekan politik.

IMF menggambarkan 2025 sebagai tahun yang “fluida dan volatil,” dengan dinamika global sangat dipengaruhi penataan ulang prioritas kebijakan, terutama terkait perdagangan. Sementara itu, WTO menyebut bahwa tanpa gelombang tarif dan ketidakpastian tersebut, pertumbuhan perdagangan barang pada 2025 bisa saja jauh lebih tinggi. Artinya, perlambatan ekonomi saat ini bukan murni hasil mekanisme pasar, melainkan buah dari keputusan-keputusan politik yang disengaja. Di sinilah terlihat bahwa dalam ekonomi-politik kontemporer, pasar bukan arena netral; pasar adalah ruang yang diatur, dinegosiasikan, dan kadang-kadang dipersenjatai. ([IMF](#))

Namun negara strategis bukan selalu negara yang efektif. Tantangannya ialah bagaimana membedakan negara yang produktif dari negara yang predatoris. Negara yang produktif menggunakan kebijakan industri untuk memperluas kapasitas nasional, meningkatkan keterampilan tenaga kerja,

dan mendorong inovasi domestik. Negara predatoris memakai kebijakan yang sama untuk melanggengkan rente, memberi privilese pada kelompok dekat kekuasaan, dan menutup ruang kompetisi. Karena itu, kualitas institusi menjadi pembeda utama. Kekuatan negara yang tidak dikendalikan oleh akuntabilitas publik justru dapat melahirkan ekonomi yang stagnan tetapi represif.

4. Pasar Kontemporer: Efisiensi, Ketidakpastian, dan Fragmentasi

Pasar global saat ini bekerja dalam iklim ketidakpastian yang tinggi. IMF memperkirakan pertumbuhan global tetap positif, namun melambat; WTO bahkan mencatat bahwa volume perdagangan barang dunia pada 2025 dapat berbalik dari pertumbuhan 2,9 persen pada 2024 menjadi kontraksi 0,2 persen pada 2025. UNCTAD, dengan pendekatan yang lebih menekankan sisi risiko, menilai ekonomi dunia sedang menuju lintasan yang mendekati fase resesi, dengan pertumbuhan 2025 diperkirakan hanya 2,3 persen dan ketidakpastian kebijakan ekonomi mencapai titik tertinggi abad ini pada awal 2025. Perbedaan angka antarlembaga tidak menghapus satu pesan pokok: ekonomi dunia sedang bertumbuh dalam keadaan rapuh. ([IMF](#))

Kerentanan ini mengubah perilaku pasar. Perusahaan menunda investasi, mendiversifikasi pemasok, menumpuk stok strategis, atau memindahkan fasilitas produksi bukan semata karena ongkos, tetapi karena ancaman disrupsi kebijakan. UNCTAD mencatat bahwa lonjakan perdagangan pada akhir 2024 dan awal 2025 sebagian dipicu oleh percepatan pesanan sebelum tarif baru berlaku, lalu momentum itu diperkirakan memudar seiring implementasi tarif. Fenomena ini penting secara analitis: pasar bukan hanya merespons harga aktual, tetapi juga ekspektasi terhadap keputusan politik di masa depan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Konsekuensi lanjutannya adalah munculnya ekonomi berbiaya lebih tinggi namun dianggap lebih aman. Dalam jangka pendek, strategi ini dapat mengurangi efisiensi dan menekan produktivitas. Dalam jangka menengah,

ia mungkin menciptakan lanskap ekonomi yang lebih tersegmentasi: blok-blok perdagangan, jaringan teknologi yang tidak kompatibel, dan pola investasi yang dikaitkan dengan aliansi geopolitik. Secara normatif, ini menghadirkan dilema. Ketahanan memang penting, tetapi bila terlalu jauh mendorong pemisahan blok, negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas teknologi dan fiskal besar justru bisa tersisih dari manfaat globalisasi.

Tekanan lain pada pasar datang dari pembiayaan pembangunan. UNCTAD melaporkan indikasi penurunan official development assistance dari donor utama dan meningkatnya tekanan utang pada banyak negara berpendapatan rendah. Lebih dari setengah negara berpendapatan rendah berada dalam atau dekat risiko distress utang, sementara arus modal cenderung bergerak ke aset yang dianggap lebih aman di negara maju. Dalam situasi demikian, pasar keuangan global berfungsi tidak hanya sebagai saluran investasi, tetapi juga sebagai mekanisme seleksi yang memperlebar ketimpangan kapasitas antarnegara. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

5. Masyarakat: Pertumbuhan tanpa Ketenangan Sosial?

Dari sudut pandang masyarakat, paradoks ekonomi-politik kontemporer sangat terasa. Banyak negara masih mencatat pertumbuhan ekonomi, tetapi rasa aman sosial tidak otomatis menguat. ILO melaporkan bahwa pada 2024 tingkat pengangguran global bertahan di 5 persen, namun pengangguran kaum muda tetap tinggi di 12,6 persen, sementara pekerjaan informal dan working poverty kembali ke tingkat pra-pandemi. Ini menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan tidak selalu identik dengan kualitas pekerjaan. Sebuah masyarakat bisa tampak "stabil" secara makro, tetapi warganya tetap hidup dalam ketidakpastian upah, kontrak kerja, dan perlindungan sosial. ([International Labour Organization](#))

UNDP menambahkan lapisan yang lebih dalam pada masalah ini. Laporan Human Development Report 2025 menunjukkan bahwa laju kemajuan

pembangunan manusia global melemah, kenaikan nilai HDI diproyeksikan menjadi yang terendah sejak pencatatan dimulai 35 tahun lalu, dan kesenjangan antara negara ber-HDI sangat tinggi dan rendah kembali melebar dalam empat tahun terakhir. Dengan kata lain, walaupun sebagian indikator ekonomi makro tampak pulih, kemampuan manusia untuk hidup lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih aman justru tidak meningkat secepat yang diharapkan.

Dalam konteks inilah pertanyaan tentang legitimasi politik menjadi krusial. Ketika pertumbuhan tidak menghadirkan rasa keadilan, masyarakat menjadi lebih mudah menerima politik kemarahan, nasionalisme ekonomi, atau janji-janji populis yang menyederhanakan masalah kompleks. V-Dem mencatat bahwa demokrasi dunia pada 2025, bila dilihat dari rata-rata warga global, telah mundur ke level sekitar akhir 1970-an; 92 negara dikategorikan autokrasi, 87 demokrasi, dan 74 persen populasi dunia hidup dalam rezim autokratis. Kebebasan berekspresi juga disebut sebagai aspek demokrasi yang paling banyak memburuk. Data ini mengingatkan bahwa ketidakpuasan ekonomi dan kerapuhan institusi dapat saling memperkuat.

Secara sosiologis, masyarakat kontemporer menghadapi transformasi yang bukan sekadar material, tetapi juga kognitif. Warga tidak hanya bekerja dan berbelanja di pasar; mereka juga hidup di dalam ekosistem informasi yang dimediasi platform. Preferensi politik, konsumsi berita, bahkan persepsi tentang kebenaran makin banyak dipengaruhi oleh algoritma. Maka batas antara ekonomi, media, dan politik menjadi kabur. Perusahaan platform tidak lagi semata-mata korporasi bisnis, melainkan infrastruktur sosial yang ikut menentukan siapa yang terlihat, siapa yang tenggelam, dan bagaimana opini publik dibentuk.

6. Pasar Digital dan AI: Kekuasaan Baru atas Data, Infrastruktur, dan Imajinasi

Ekonomi digital memperlihatkan secara tajam bagaimana pasar modern sarat dengan konsentrasi kekuasaan. UNCTAD memperkirakan ekonomi

digital tumbuh sekitar 10–12 persen per tahun, melampaui pertumbuhan PDB global. Di sisi AI, UNCTAD menyatakan pasar AI dapat mencapai nilai sekitar US\$4,8 triliun pada 2033, tetapi manfaatnya sangat terkonsentrasi. Hanya 100 perusahaan—terutama di Amerika Serikat dan Tiongkok—menyumbang sekitar 40 persen belanja R&D korporasi global, dan 118 negara tidak terwakili dalam forum utama tata kelola AI. Ini berarti inovasi digital bukan sekadar kisah kemajuan, melainkan juga kisah pemusatan kekuasaan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Konsentrasi ini terlihat pula pada infrastruktur internet. Analisis Bank Dunia menunjukkan bahwa lalu lintas data internet sangat terkonsentrasi pada sedikit perusahaan; enam perusahaan berbasis di AS menghasilkan lebih dari 40 persen arus data internet dunia, dan di sampel 17 negara berpendapatan rendah-menengah, sekitar 60 persen dari 25 situs teratas dimiliki lima perusahaan AS. Secara ekonomi, ini memberi skala dan efisiensi. Namun secara politik, ia menciptakan asimetri yang besar: segelintir perusahaan menguasai pintu masuk terhadap data, perhatian, iklan, dan distribusi konten. ([World Bank](#))

Karena itu, persaingan di pasar digital tidak bisa lagi dianalisis hanya dengan ukuran harga. Bank Dunia menegaskan bahwa dalam pasar digital, kesejahteraan konsumen juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi, kualitas layanan, dan risiko akuisisi antipersaingan. OECD pun mencatat tren global penguatan penegakan kebijakan persaingan, sebagian karena perubahan struktur pasar dan kebutuhan sumber daya otoritas kompetisi yang makin besar. Pasar digital dengan demikian memaksa negara memperluas definisi regulasi: yang dilindungi bukan hanya harga murah, tetapi juga kebebasan memilih, privasi, dan kesempatan bagi inovator baru untuk masuk. ([World Bank](#))

Bagi negara berkembang, tantangannya lebih berat. World Bank Digital Progress and Trends Report 2025 menyebut bahwa negara berpendapatan rendah dan menengah menghadapi hambatan besar untuk mengadopsi

atau menerapkan AI secara efektif dan dalam skala luas. Laporan itu menekankan empat fondasi utama—connectivity, compute, context, dan competency—sebagai prasyarat AI yang inklusif. Artinya, AI tidak cukup dipandang sebagai aplikasi atau chatbot; ia memerlukan listrik andal, jaringan data, pusat komputasi, data lokal yang relevan, dan keterampilan manusia. Tanpa fondasi itu, negara berkembang hanya menjadi konsumen teknologi, bukan produsen nilai. ([World Bank](#))

Dimensi sosial AI juga tidak bisa diabaikan. UNCTAD mengingatkan bahwa hingga 40 persen pekerjaan global dapat terdampak oleh AI. Dampak itu tidak otomatis berarti pengangguran massal, tetapi jelas berarti restrukturisasi pekerjaan, tuntutan reskilling, dan pergeseran daya tawar antara modal dan tenaga kerja. Bila manfaat otomatisasi lebih banyak dinikmati pemilik modal, maka AI berpotensi memperlebar ketimpangan. Sebaliknya, bila dikaitkan dengan pendidikan, produktivitas UMKM, kesehatan, dan layanan publik, AI dapat menjadi alat pemerataan kapasitas. Jadi pertanyaan utamanya bukan “apakah AI datang,” melainkan “siapa yang menyiapkan institusi agar AI menguntungkan masyarakat luas.” ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

7. Politik Kontemporer: Demokrasi, Legitimasi, dan Krisis Representasi

Politik kontemporer menghadapi tantangan serius bukan hanya dari aktor-aktor otoriter klasik, tetapi juga dari erosi representasi di dalam demokrasi itu sendiri. Ketika warga merasa bahwa institusi politik tidak mampu mengendalikan harga, menyediakan pekerjaan bermutu, atau membatasi dominasi korporasi besar, maka jarak antara prosedur demokrasi dan pengalaman hidup sehari-hari makin melebar. Demokrasi formal mungkin tetap berlangsung, tetapi legitimasi substantif melemah.

V-Dem menggambarkan tren ini dengan keras: dunia terus bergerak ke arah yang lebih autokratis, dan untuk rata-rata warga global, level demokrasi telah kembali ke kisaran 1978. Hal ini penting bukan karena semua negara akan berubah menjadi diktatur, melainkan karena kualitas

kebebasan sipil, pluralisme media, dan checks and balances makin rentan. Ketika kebebasan berekspresi melemah, kemampuan masyarakat untuk mengoreksi kebijakan ekonomi yang keliru juga ikut melemah. Akibatnya, ekonomi buruk dan politik tertutup dapat membentuk lingkaran yang saling mengunci.

Dalam situasi demikian, politik tidak lagi sekadar memperebutkan ideologi besar, tetapi juga memperebutkan narasi tentang keamanan ekonomi. Tarif dapat dijual sebagai perlindungan nasional. Subsidi industri dapat dijual sebagai kebangkitan martabat nasional. Kontrol data dapat dijual sebagai kedaulatan digital. Sebagian dari kebijakan itu mungkin memang perlu. Namun tanpa akuntabilitas, bahasa kedaulatan mudah berubah menjadi selubung bagi pemusatan kuasa. Oleh sebab itu, ekonomi-politik kontemporer menuntut kemampuan membedakan antara kebijakan strategis yang sah dan kebijakan eksklusif yang hanya menguntungkan elite.

8. Indonesia dalam Pusaran Ekonomi-Politik Kontemporer

Indonesia memberi contoh menarik tentang bagaimana sebuah negara berkembang besar menavigasi tekanan global sambil menjaga stabilitas domestik. Bank Indonesia, mengutip data BPS, menyatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen year-on-year pada triwulan IV 2025, dan secara keseluruhan 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dari 2024. Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi, menunjukkan bahwa permintaan domestik tetap menjadi jangkar utama ekonomi nasional. ([Bank Indonesia](#))

Dari sisi sosial, BPS melaporkan persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Pada saat yang sama, gini ratio turun menjadi 0,363 dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Ini adalah perkembangan positif yang menunjukkan adanya perbaikan distribusi pengeluaran dan penurunan kemiskinan. Namun data yang sama juga memperlihatkan bahwa

kemiskinan di perdesaan, sebesar 10,72 persen, masih jauh lebih tinggi dibanding perkotaan yang 6,60 persen. Jadi, perbaikan agregat belum menghapus dualisme spasial dan struktural dalam perekonomian Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Secara ekonomi-politik, kondisi Indonesia memperlihatkan tiga pelajaran. Pertama, pertumbuhan tetap penting karena ia menyediakan ruang fiskal dan psikologis bagi stabilitas nasional. Kedua, pertumbuhan saja tidak cukup; kualitas distribusi dan konektivitas wilayah tetap menentukan legitimasi pembangunan. Ketiga, dalam era global yang penuh ketidakpastian, ketahanan domestik—konsumsi, investasi, pangan, energi, dan transformasi digital—menjadi semakin penting. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pasar global, tetapi juga tidak mungkin menutup diri darinya.

Di sinilah relevansi strategi negara menjadi nyata. Indonesia perlu membangun kapasitas industri, pengolahan, dan inovasi digital tanpa jatuh pada proteksionisme sempit yang mematikan kompetisi. Negara harus cukup kuat untuk memandu transformasi, tetapi juga cukup terbuka untuk menerima kritik, menjaga aturan main yang adil, dan mencegah penangkapan kebijakan oleh kelompok rente. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Indonesia membutuhkan negara pembangunan yang demokratis: negara yang mampu bertindak, namun tetap dapat diawasi.

9. Agenda Kebijakan: Mencari Keseimbangan Baru

Pelajaran utama dari ekonomi-politik kontemporer adalah bahwa dikotomi sederhana antara “negara” versus “pasar” sudah tidak memadai. Yang diperlukan adalah arsitektur institusional yang membuat keduanya saling mengoreksi dan saling menguatkan. Negara dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, perlindungan sosial, regulasi data, dan kebijakan industri. Pasar dibutuhkan untuk inovasi, insentif efisiensi, dan alokasi sumber daya yang responsif. Masyarakat sipil dibutuhkan

untuk menguji legitimasi, mengawasi penyalahgunaan kuasa, dan menjaga agar pembangunan tidak kehilangan orientasi manusia.

Agenda pertama ialah memperkuat kapasitas negara secara selektif dan cerdas. Dalam konteks global yang terfragmentasi, negara harus memiliki kemampuan membaca risiko rantai pasok, mendukung sektor strategis, dan membangun fondasi AI seperti yang digarisbawahi Bank Dunia: konektivitas, komputasi, data, dan keterampilan. Namun penguatan kapasitas ini harus dibarengi disiplin evaluasi, transparansi, dan pengawasan publik agar kebijakan industri tidak berubah menjadi rente permanen. ([World Bank](#))

Agenda kedua ialah membangun kontrak sosial baru bagi pasar tenaga kerja. Data ILO dan UNCTAD menunjukkan bahwa transformasi digital dan AI akan mengubah struktur pekerjaan, sementara pekerjaan informal dan kualitas kerja tetap menjadi masalah besar. Maka kebijakan ketenagakerjaan tidak cukup berhenti pada penciptaan lapangan kerja kuantitatif. Ia harus menyentuh pelatihan ulang, jaminan transisi kerja, penguatan produktivitas, dan perluasan perlindungan sosial untuk pekerja formal maupun informal. ([International Labour Organization](#))

Agenda ketiga ialah menata pasar digital dan kekuasaan platform. Pasar digital yang dibiarkan terlalu terkonsentrasi akan mempersempit ruang inovasi domestik dan memperlemah kedaulatan data. Karena itu, kebijakan persaingan, interoperabilitas, perlindungan data, dan tata kelola merger di ekonomi digital menjadi bagian penting dari agenda pembangunan, bukan sekadar isu teknis regulasi. Temuan Bank Dunia tentang konsentrasi lalu lintas data internet dan dominasi situs oleh segelintir perusahaan menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. ([World Bank](#))

Agenda keempat ialah memulihkan legitimasi demokrasi melalui hasil yang nyata. V-Dem menunjukkan tekanan berat pada demokrasi global, sementara UNDP mengingatkan bahwa pembangunan manusia melambat dan ketimpangan antarnegara kembali melebar. Dalam situasi seperti ini,

demokrasi perlu menunjukkan kemampuannya menghasilkan kebijakan yang efektif dan adil. Demokrasi yang hanya prosedural, tetapi gagal menjawab kecemasan ekonomi, akan mudah digeser oleh otoritarianisme yang menjanjikan ketertiban. Sebaliknya, otoritarianisme yang tampak efisien pun pada akhirnya rapuh bila tidak memiliki mekanisme koreksi.

10. Penutup

Ekonomi dan politik kontemporer memperlihatkan bahwa kekuasaan, pasar, dan masyarakat tidak pernah bergerak sendiri-sendiri. Negara kembali aktif karena dunia makin tidak pasti. Pasar makin strategis karena dagang, energi, teknologi, dan data telah menjadi instrumen pengaruh. Masyarakat makin rentan sekaligus makin terhubung karena transformasi digital membuka peluang besar, tetapi juga memusatkan kuasa dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Makalah ini menegaskan bahwa problem utama zaman kita bukan semata-mata rendahnya pertumbuhan, tetapi rapuhnya jembatan antara pertumbuhan, keadilan, dan legitimasi. Pertumbuhan tanpa distribusi yang memadai akan menghasilkan kemarahan sosial. Kedaulatan tanpa akuntabilitas akan melahirkan dominasi elite. Inovasi tanpa tata kelola akan memperlebar ketimpangan. Demokrasi tanpa kapasitas negara akan terlihat lemah; tetapi negara tanpa demokrasi akan kehilangan koreksi moral dan institusionalnya.

Karena itu, tantangan terbesar ekonomi-politik kontemporer adalah membangun keseimbangan baru: negara yang strategis tetapi akuntabel, pasar yang dinamis tetapi adil, dan masyarakat yang adaptif tetapi tetap terlindungi. Di tengah perlambatan global, fragmentasi dagang, konsentrasi digital, dan tekanan terhadap demokrasi, masa depan tidak ditentukan oleh satu variabel ekonomi tunggal. Ia ditentukan oleh kualitas pilihan politik yang membingkai pasar dan oleh keberanian masyarakat untuk menuntut pembangunan yang bukan hanya besar, tetapi juga bermartabat. ([IMF](#))

Glosarium

Autokrasi: sistem politik yang memusatkan kekuasaan pada sedikit aktor, dengan pembatasan kuat terhadap kompetisi politik dan kebebasan sipil.

Demokrasi liberal: bentuk demokrasi yang tidak hanya memiliki pemilu, tetapi juga checks and balances, rule of law, dan perlindungan hak-hak sipil.

Ekonomi digital: aktivitas ekonomi yang bertumpu pada data, platform, jaringan internet, komputasi, dan layanan digital.

Ekonomi-politik: pendekatan yang mempelajari hubungan timbal balik antara kekuasaan, institusi, pasar, dan distribusi sumber daya.

Fragmentasi geoekonomi: pemecahan keterhubungan ekonomi global ke dalam blok-blok yang dipengaruhi pertimbangan geopolitik, keamanan, dan aliansi strategis.

Geoeconomics: penggunaan instrumen ekonomi—seperti tarif, investasi, sanksi, teknologi, dan rantai pasok—untuk mencapai tujuan politik dan strategis.

HDI (Human Development Index): indeks pembangunan manusia yang menggabungkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Kebijakan industri: intervensi negara untuk mendukung sektor-sektor tertentu melalui insentif, proteksi, pembiayaan, atau pembangunan kapasitas.

Konsentrasi pasar: keadaan ketika pangsa pasar atau infrastruktur penting dikuasai oleh sedikit perusahaan atau aktor.

Legitimasi politik: penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah atau institusi politik sebagai sah dan layak ditaati.

Perlindungan sosial: sistem kebijakan yang melindungi warga dari risiko ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, sakit, dan disrupsi pendapatan.

Rantai pasok: jaringan proses produksi, distribusi, logistik, dan perdagangan yang menghubungkan pemasok, produsen, dan konsumen.

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*.

Bank Indonesia. (2026). *Ekonomi Indonesia triwulan IV 2025 tumbuh 5,39%*.

International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: Trends 2025*. ILO.

International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook, October 2025: Global economy in flux, prospects remain dim*. IMF.

OECD. (2025). *OECD competition trends 2025*. OECD Publishing.

United Nations Conference on Trade and Development. (2025a). *Technology and innovation report 2025: Inclusive artificial intelligence for development*. UNCTAD.

United Nations Conference on Trade and Development. (2025b). *Trade and development foresights 2025: Under pressure—uncertainty reshapes global economic prospects*. UNCTAD.

United Nations Conference on Trade and Development. (2025c). *World investment report 2025: International investment in the digital economy*. UNCTAD.

United Nations Conference on Trade and Development. (2025d, April 7). *AI's \$4.8 trillion future: UN Trade and Development alerts on divides, urges action*.

United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice—People and possibilities in the age of AI*. UNDP.

V-Dem Institute. (2026). *Democracy report 2026: Unraveling the democratic era?* University of Gothenburg.

World Bank. (2025a). *Digital progress and trends report 2025: Strengthening AI foundations*. World Bank.

World Bank. (2025b). *Antitrust and digital platforms: An analysis of global patterns and approaches by competition authorities*. World Bank.

World Trade Organization. (2025). *Global trade outlook and statistics, April 2025*. WTO.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 8 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d6386a-621c-83a0-bebe-7b2a4b62b7c5>